

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pelaku ancaman kekerasan dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dan pembahasan: bahwa disparitas dalam pemidanaan tindak pidana ancaman kekerasan sering terjadi karena faktor-faktor yang kompleks dan pengaturan yang masih kurang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, hakim diharapkan untuk memahami nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat serta mengacu pada doktrin dan yurisprudensi yang ada. Contoh konkretnya adalah dalam dua putusan di Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa yang melakukan tindak pidana serupa dengan dakwaan yang sama diberikan hukuman yang berbeda, menunjukkan inkonsistensi dalam pertimbangan hakim terhadap pengaturan pemidanaan. Pasal 335 KUHP menyatakan bahwa apabila seseorang secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan maka dipidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam putusan pengadilan negeri jambi nomor 372/Pid.B/2023/Pn Jmb pelaku ancaman kekerasan dijatuhi hukuman lebih ringan, serta pemidanaan menggunakan teori *integratif*, sedangkan terdakwa pada putusan nomor 636/Pid.B/2022/Pn Jmb dijatuhi hukuman lebih berat dan teori pemidanaan berdasarkan teori pembalasan. Meskipun tindak pidana dilakukan dengan cara yang serupa dan menghasilkan akibat yang sama, pada putusan pertama lebih condong kepada keadilan bagi terdakwa putusan kedua lebih menjurus kepada kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *pertimbangan hakim, pemidanaan, ancaman kekerasan*

ABSTRACT

The purpose of this study is: to know and analyze the basis of judges' considerations for the conviction of perpetrators of violent threats and to know and analyze the factors that affect the disparity of judges' decisions. This type of research is normative juridical research. Results and discussion: that disparities in punishment for criminal acts of threats of violence often occur due to complex factors and unclear regulations in the Criminal Code (KUHP). However, judges are expected to understand the values of law and societal justice and refer to existing doctrine and jurisprudence. A concrete example is in two decisions at the Jambi District Court, defendants who committed similar crimes with the same charges were given different sentences, showing inconsistencies in the judge's consideration of sentencing arrangements. Article 335 (KUHP) which regulates that if someone unlawfully forces another person to do or not do something with the threat of violence, they will be sentenced to prison for a maximum of 1 year. In the Jambi District Court decision number 372/Pid.B/2023/Pn Jmb, the perpetrator of the threat of violence was given a lighter sentence, and the sentence used a combined/integrative theory, while the defendant in decision number 636/Pid.B/2022/Pn Jmb was sentenced to more. severity and a theory of punishment based on the theory of retaliation. Even though criminal acts are committed in similar ways and produce the same consequences, the first verdict tends more towards justice for the defendant, the second verdict leads more towards legal certainty and justice.

Keywords: *judge's consideration, punishment, threat of violence*